

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM Mendukung KUALITAS Pendidikan BERKELANJUTAN DI KECAMATAN Jabung (Studi Pada SPPG Kemantren Kecamatan Jabung)

Yessiska Stefanni Lafrense¹, Suyeno², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: stefannilafrenseyessiska@gmail.com*

ABSTRAK

Rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) ialah salah satu kebijakan pemerintah yang ditunjukkan buat tingkatkan pemenuhan kebutuhan gizi partisipan didik selaku bagian dari upaya menunjang mutu pembelajaran yang berkepanjangan. Keberhasilan penerapan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh daya guna implementasi pada tingkatan pelaksana. Riset ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Makan Bergizi Free di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi(SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung dan mengenali faktor- faktor yang menunjang serta membatasi penerapannya. Riset memakai pendekatan kualitatif dengan tipe riset deskriptif. Informasi diperoleh lewat observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, setelah itu dianalisis memakai model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana melalui langkah-langkah seperti kondensasi informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas informasi diuji memakai triangulasi sumber serta triangulasi metode. Hasil riset menampilkan kalau implementasi kebijakan sudah berlangsung lumayan efisien bersumber pada ukuran komunikasi, sumber energi, disposisi, serta struktur birokrasi. Koordinasi antar pelaksana, ketersediaan sumber energi manusia, sokongan fasilitas serta prasarana, dan pelaksanaan prosedur operasional jadi aspek utama yang menunjang penerapan program. Ada pula hambatan yang masih ditemui berkaitan dengan proses distribusi santapan mengarah sekolah- sekolah yang mempunyai jarak relatif jauh sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelayanan. Riset ini merumuskan kalau implementasi Kebijakan Makan Bergizi Free di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung sudah berjalan cocok syarat serta berkontribusi dalam menunjang pemenuhan gizi partisipan didik dan kenaikan mutu pembelajaran yang berkepanjangan, walaupun penyempurnaan sistem distribusi masih dibutuhkan supaya penerapan program terus menjadi maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Makan Bergizi Gratis, SPPG, Kualitas Pendidikan Berkelanjutan, George C. Edwards III

Pendahuluan

Kenaikan mutu sumber energi manusia tidak bisa dipisahkan dari terpenuhinya kebutuhan gizi partisipan didik. Gizi yang mencukupi berfungsi berarti dalam menunjang perkembangan raga, pertumbuhan kognitif, dan keahlian belajar anak sehingga jadi salah satu prasyarat terwujudnya pembelajaran yang berkepanjangan. Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Zero Hunger) serta Tujuan 4 (Quality Education), pemerintah Indonesia meningkatkan bermacam kebijakan buat tingkatkan status gizi warga, salah satunya lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang selaku wujud intervensi pemerintah dalam penunjang kebutuhan gizi partisipan didik sekaligus tingkatkan mutu pendidikan lewat keadaan kesehatan yang lebih baik.

Walaupun bermacam upaya sudah dicoba, perkara gizi anak di Indonesia masih jadi tantangan. Informasi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023 tingkat stunting di negara ini masih tinggi. menggapai 21, 5%, sebaliknya prevalensi anemia pada anak muda gadis terletak pada kisaran 15–18%. Tidak hanya itu, rata- rata mengkonsumsi kalori warga Indonesia masih terletak di dasar standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), ialah 2. 112 kkal/ kapita/ hari dibanding kebutuhan sempurna sebesar 2. 150 kkal/ kapita/ hari. Keadaan tersebut menampilkan kalau pemenuhan kebutuhan gizi warga, khususnya pada kelompok umur sekolah, masih membutuhkan atensi sungguh- sungguh seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1. 1.

Tabel 1. 1 Kondisi Gizi Nasional Indonesia

Indikator	Nilai (%) / Jumlah	Sumber
Prevalensi Stunting Nasional	21,5	Kemenkes RI (2023)
Prevalensi Anemia Remaja Putri	15–18	Kemenkes RI (2023)
Rata-rata Konsumsi Kalori	2.112 kkal/kapita/hari	BPS (2023)
Standar Kecukupan Energi	2.150 kkal/kapita/hari	AKG Kemenkes

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2023); Badan Pusat Statistik (2023)

Informasi tersebut menampilkan kalau kasus gizi tidak cuma berkaitan dengan aspek kesehatan, namun pula berakibat terhadap mutu pembelajaran. Kekurangan konsumsi gizi bisa merendahkan konsentrasi belajar, tingkatan resiko ketidakhadiran di sekolah, dan mempengaruhi pertumbuhan kognitif partisipan didik. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah lewat Program Makan Bergizi Free ditatap selaku investasi jangka panjang dalam pembuatan sumber energi manusia yang berkualitas tinggi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses perencanaan menu, pengolahan, sampai distribusi santapan kepada partisipan didik, bertanggung jawab untuk menerapkan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional pada tahun 2025. Bersumber pada ditaksir distribusi sasaran nasional, lebih dari 56% penerima khasiat terletak di Pulau Jawa sehingga daerah ini jadi fokus utama penerapan program. Tingginya jumlah sasaran menimbulkan implementasi kebijakan mengalami tantangan yang berbeda pada tiap daerah, mulai dari kapasitas penciptaan, distribusi santapan, sampai pengawasan kualitas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 2.

Tabel 1. 2 Distribusi sasaran MBG per Wilayah (Estimasi 2025)

Wilayah	Persentase Sasaran Nasional (%)	Karakter Tantangan Utama
Pulau Jawa	±56	Kepadatan sekolah, skala besar
Sumatera	±21	Jarak antarwilayah, akses
Kalimantan	±8	Akses geografis, logistik
Sulawesi	±9	Infrastruktur dapur produksi
Bali & Nusa Tenggara	±6	Transportasi & bahan pangan

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2024); Badan Pusat Statistik (2023)

Besarnya cakupan penerima manfaat di Pulau Jawa menjadikan efektivitas implementasi kebijakan sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan Program MBG. Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program melalui SPPG Kemantren dengan cakupan pelayanan pada jenjang TK, SD, MTs, dan MA. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan program telah berjalan sesuai pedoman, namun masih ditemukan beberapa kendala, terutama pada aspek distribusi makanan menuju sekolah yang memiliki jarak relatif jauh Tidak hanya itu, koordinasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional adalah faktor lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas Program Makan Bergizi Gratis dari perspektif pemenuhan gizi, ketahanan pangan, maupun dampaknya terhadap kesehatan peserta didik. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan menggunakan perspektif George C. Edwards III, terutama pada tingkat pelaksana teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), masih relatif terbatas. Tidak hanya substansi kebijakan itu sendiri yang menentukan keberhasilan, tetapi juga komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung proses implementasi.

Dengan mempertimbangkan situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kebijakan Makan Bergizi Gratis diterapkan di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi empiris untuk pengembangan program Makan Bergizi Gratis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan bisa memperkaya pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan publik lewat pelaksanaan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam menganalisis penerapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak hanya itu, hasil riset ini diharapkan jadi rujukan ilmiah untuk riset berikutnya yang mengkaji implementasi kebijakan di bidang pemenuhan gizi serta kenaikan mutu pembelajaran yang berkepanjangan.

2. Manfaat Praktis

Riset ini diharapkan bisa jadi bahan masukan serta penilaian untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung, Tubuh Gizi Nasional, dan lembaga terpaut dalam tingkatan daya guna implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya itu, hasil riset ini diharapkan bisa jadi bawah pertimbangan dalam penyempurnaan koordinasi, pengelolaan sumber energi, serta sistem distribusi program sehingga tujuan pemenuhan gizi partisipan didik dan kenaikan mutu pembelajaran yang berkepanjangan bisa tercapai secara maksimal.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah keputusan ataupun aksi yang diambil pemerintah buat menanggulangi bermacam kasus warga serta menggapai tujuan pembangunan. Bagi Dye (2017), kebijakan publik merupakan whatever governments choose to do or not to do, ialah seluruh suatu yang diputuskan pemerintah buat dicoba ataupun tidak dicoba dalam merespons sesuatu perkara publik. Kebijakan publik tidak cuma diwujudkan dalam wujud peraturan, namun pula program, aktivitas, serta aksi administratif yang dirancang buat tingkatan kesejahteraan warga. Dengan demikian, kebijakan publik jadi instrumen pemerintah dalam memusatkan pembangunan, mengalokasikan sumber energi, dan menuntaskan bermacam perkara sosial.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah tahapan yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan penerapan di lapangan. Edwards III (1980) menarangkan kalau implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan pemerintah ke dalam aksi operasional yang dicoba oleh organisasi pelaksana supaya tujuan kebijakan bisa tercapai. Keberhasilan implementasi tidak cuma ditetapkan oleh mutu formulasi kebijakan, namun pula oleh keahlian organisasi dalam mengelola sumber energi serta melakukan program cocok keadaan yang dialami.

Dalam riset ini, implementasi kebijakan dianalisis memakai model George C. Edwards III yang menekankan 4 variabel utama, ialah komunikasi (communication), sumber energi (resources), disposisi (disposition), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure). Komunikasi berkaitan dengan penyampaian data kebijakan secara jelas, tidak berubah- ubah, serta gampang dimengerti oleh pelaksana. Sumber energi mencakup ketersediaan sumber energi manusia, data, kewenangan, anggaran, dan fasilitas serta prasarana yang menunjang penerapan kebijakan. Disposisi menampilkan komitmen, perilaku, serta kesediaan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan cocok tujuan yang sudah diresmikan. Sedangkan itu, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) selaku pedoman penerapan. Keempat variabel tersebut digunakan selaku bawah analisis buat memperhitungkan implementasi Program Makan Bergizi Free di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung.

Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan nutrisi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab untuk menjalankan program ini. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG ialah bagian dari school feeding program yang tidak cuma berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi partisipan didik, namun pula menunjang kenaikan mutu pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sumber energi manusia. Keberhasilan penerapan program dipengaruhi oleh daya guna tata kelola, koordinasi antar pelaksana, dan sistem pengawasan yang diterapkan sepanjang proses implementasi.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Program Makan Bergizi Free mempunyai keterkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Zero Hunger) dan Tujuan 4 (Quality Education). SDGs ialah jadwal pembangunan global yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkepanjangan lewat penyeimbang aspek ekonomi, sosial, serta area. Dalam konteks pembelajaran, SDGs menekankan berartinya penyediaan pembelajaran yang inklusif, bermutu, serta menyeluruh. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan gizi partisipan didik lewat Program MBG diharapkan sanggup tingkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, dan mutu pembelajaran sehingga membagikan donasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkepanjangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan berdasarkan kondisi lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara sistematis dan kontekstual berbagai fenomena yang terjadi, serta mengidentifikasi komponen yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Fokus Penelitian

Fokus riset ini mengacu pada Model implementasi kebijakan George C. Edwards III terdiri dari empat dimensi: komunikasi (komunikasi), sumber energi (sumber daya), disposisi (disposisi), dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan elemen-elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung.

Situs dan Latar Penelitian

Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemantren Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, penelitian ini dilakukan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis yang bertanggung jawab dalam penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan bergizi kepada peserta didik pada jenjang TK, SD, MTs, dan MA. Selain itu, SPPG Kemantren Kecamatan Jabung telah melaksanakan Program MBG sejak tahun 2025 sehingga dinilai representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat pelaksana teknis.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama. Riset lewat proses pengumpulan informasi di lapangan. Dalam riset ini, informasi primer diperoleh lewat observasi serta wawancara mendalam dengan informan yang diseleksi memakai metode purposive sampling, ialah Kepala SPPG Kemantren Kecamatan Jabung, pakar gizi, tenaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pihak sekolah penerima khasiat. Informan tersebut diseleksi sebab mempunyai pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan MBG sehingga sanggup membagikan data yang relevan dengan fokus riset.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah informasi pendukung yang berasal dari berbagai sumber tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Petunjuk Teknis untuk Manajemen Program Makan Bergizi Gratis Tahun ini adalah sumber data sekunder dari penelitian ini 2025, dokumen kelembagaan SPPG Kemantren Kecamatan Jabung, informasi penerima khasiat, laporan penerapan program, struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan bermacam literatur, peraturan perundang-undangan, harian ilmiah, serta dokumen lain yang menunjang analisis implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses penerapan. Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung. Wawancara dicoba secara mendalam kepada informan yang ikut serta dalam implementasi program guna mendapatkan data menimpa penerapan kebijakan. Dokumentasi digunakan buat memenuhi informasi riset lewat bermacam dokumen, arsip, gambar aktivitas, dan dokumen administrasi yang berkaitan dengan penerapan Program MBG.

Teknik Analisis Data

Model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) digunakan untuk analisis data, yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan informasi (informasi pengumpulan), kondensasi informasi (informasi kondensasi), penyajian informasi (informasi penampilan), dan penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing dan verifikasi).

kesimpulan). Analisis dicoba secara berkesinambungan semenjak proses pengumpulan informasi sampai riset berakhir sehingga menciptakan interpretasi yang komprehensif terhadap implementasi Kebijakan Makan Bergizi Free di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam riset ini diuji lewat Data yang dikumpulkan dari berbagai informan disatukan, sedangkan triangulasi metode menggabungkan hasil dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pelaksanaan kedua metode tersebut bertujuan buat tingkatan kredibilitas, konsistensi, dan validitas informasi yang diperoleh sepanjang proses riset.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung

a. Komunikasi

Penerapan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung menampilkan kalau komunikasi sudah berlangsung secara terstruktur antara SPPG, sekolah penerima khasiat, serta pihak terpaut. Penyampaian data dicoba lewat rapat koordinasi, sosialisasi, dan media komunikasi digital yang digunakan sepanjang penerapan program. Data yang diinformasikan meliputi agenda distribusi, jumlah penerima khasiat, standar menu, sampai mekanisme pelaporan sehingga segala pelaksana mempunyai uraian yang sama. Pola komunikasi tersebut sanggup meminimalkan kesalahan dalam penerapan aktivitas serta memperlancar koordinasi antarpelaksana. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan bisa berlangsung secara lebih efisien sebab didukung oleh penyampaian data yang jelas serta berkesinambungan.

Bersumber pada perspektif Komunikasi adalah kunci keberhasilan penerapan kebijakan George C. Edwards III. Hasil riset menampilkan kalau aspek transmisi, kejelasan, serta konsistensi data sudah diterapkan dalam implementasi Program MBG di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung. Data yang diterima oleh segala pelaksana relatif seragam sehingga sanggup kurangi perbandingan interpretasi dalam penerapan program. Keadaan tersebut memperlihatkan kalau komunikasi yang efisien tidak cuma menunjang koordinasi, namun pula tingkatan kepatuhan pelaksana terhadap syarat program. Oleh sebab itu, komunikasi jadi fondasi berarti dalam mewujudkan implementasi Program MBG yang berjalan cocok dengan tujuan kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia, data, otoritas, dan fasilitas dan prasarana yang mencukupi mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung. Struktur personel terdiri atas kepala SPPG, ahli gizi, pengawas sanitasi, pengawas keuangan, tenaga pengolah makanan, petugas distribusi, serta petugas pendukung lainnya yang menjalankan tugas sesuai pembagian kerja. Selain itu, pelaksanaan program didukung oleh fasilitas operasional berupa dapur produksi, ruang penyimpanan bahan pangan, kendaraan distribusi, dan peralatan memasak yang sesuai kebutuhan. Keberadaan ahli gizi juga berperan dalam menyusun menu, menentukan gramasi, serta memastikan mutu makanan sebelum didistribusikan kepada peserta didik. Dukungan sumber daya tersebut memungkinkan seluruh tahapan penyelenggaraan program berjalan secara sistematis.

Dalam teori George C. Edwards III, sumber energi ialah prasyarat utama supaya kebijakan bisa diimplementasikan secara maksimal. Hasil riset menampilkan kalau kapasitas organisasi SPPG sudah sanggup menunjang penerapan Program MBG cocok dengan syarat yang berlaku. Pembagian kewenangan yang jelas dan sokongan sarana operasional menguatkan daya guna penerapan program di lapangan. Walaupun demikian, kenaikan kapasitas sumber energi senantiasa dibutuhkan buat mengestimasi bertambahnya jumlah penerima khasiat serta luas daerah distribusi. Dengan demikian, kesiapan sumber energi jadi aspek yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sekaligus menunjang kenaikan mutu pelayanan kepada partisipan didik.

c. Disposisi

Disposisi pelaksana dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung menampilkan komitmen yang besar dalam melaksanakan tugas cocok tanggung jawab tiap- tiap. Segala pelaksana berupaya melindungi mutu bahan pangan, proses pengolahan, dan ketepatan waktu pendistribusian santapan kepada sekolah penerima khasiat. Perilaku tanggung jawab tersebut tercermin dalam penerapan aktivitas yang mengutamakan keamanan pangan serta pemenuhan standar gizi. Penerapan program pula berlangsung tanpa tergantung pada pemberian insentif spesial sebab didasarkan pada profesionalisme tiap pelaksana. Keadaan tersebut memperlihatkan kalau keberhasilan program didukung oleh komitmen moral serta tanggung jawab dalam membagikan pelayanan kepada warga.

Bagi George C. Edwards III, disposisi berkaitan dengan keinginan serta komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil riset menampilkan kalau perilaku positif para pelaksana mendesak terlaksananya Program MBG secara tidak berubah- ubah cocok prosedur yang sudah diresmikan. Komitmen

tersebut berakibat pada terjaganya kualitas pelayanan serta mutu santapan yang diterima partisipan didik. Tidak hanya tingkatan daya guna implementasi kebijakan, disposisi yang baik pula menunjang pencapaian tujuan program dalam memenuhi kebutuhan gizi partisipan didik. Oleh sebab itu, disposisi jadi salah satu aspek berarti yang menguatkan keberhasilan implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung sudah tersusun secara jelas lewat pembagian tugas serta tanggung jawab tiap pelaksana. Kepala SPPG berfungsi selaku penanggung jawab utama, sebaliknya pengawas gizi, pengawas sanitasi, pengawas keuangan, tenaga pengolah santapan, serta petugas distribusi melakukan guna cocok bidangnya tiap- tiap. Penerapan program pula mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta petunjuk teknis yang jadi pedoman dalam tiap tahapan aktivitas. Pembagian tugas tersebut menunjang koordinasi yang lebih efisien dan kurangi kemampuan tumpang tindih kewenangan. Dengan terdapatnya struktur organisasi yang jelas, proses pengolahan sampai pendistribusian santapan bisa berlangsung secara sistematis serta terencana.

Bersumber pada George C. Edwards III, struktur birokrasi yang baik hendak tingkatan daya guna implementasi kebijakan lewat mekanisme kerja yang terorganisasi. Penemuan riset menampilkan kalau pelaksanaan SOP serta koordinasi antarpelaksana sudah menunjang kelancaran penyelenggaraan Program MBG di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung. Kejelasan pembagian tugas pula menguatkan pengawasan terhadap mutu santapan serta ketepatan distribusi kepada sekolah penerima khasiat. Keadaan tersebut menampilkan kalau struktur birokrasi tidak cuma berperan selaku pengatur organisasi, namun pula selaku instrumen buat menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang efisien jadi salah satu komponen penting yang memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

a. Faktor Pendukung

Menurut George C. Edwards III, situasi ini menunjukkan bahwa elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi maupun media komunikasi digital mempermudah penyampaian informasi mengenai jadwal distribusi, jumlah penerima manfaat, dan pelaksanaan program. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang membagi pekerjaan berdasarkan bidang mendukung kelancaran setiap tahapan kegiatan. Dukungan sarana dan prasarana seperti dapur produksi, kendaraan distribusi, serta peralatan pengolahan makanan juga memperkuat efektivitas penyelenggaraan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antarpelaksana menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor pendukung lainnya merupakan kedudukan pakar gizi dalam membenarkan mutu bahan pangan, penataan menu, penentuan gramasi santapan, dan pengawasan proses pengolahan saat sebelum santapan didistribusikan kepada partisipan didik. Keberadaan pakar gizi menolong melindungi kesesuaian menu dengan standar gizi yang sudah diresmikan sehingga mutu pelayanan senantiasa terjamin. Dari perspektif teori Menurut George C. Edwards III, situasi ini menunjukkan bahwa elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berperan secara maksimal dalam menunjang implementasi kebijakan. Keterpaduan keempat aspek tersebut mendesak penerapan Program MBG berjalan lebih efisien serta cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan. Dengan demikian, aspek pendukung yang dipunyai SPPG Kemantren Kecamatan Jabung membagikan donasi nyata terhadap keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

b. Faktor Penghambat

Meskipun implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung telah berjalan dengan baik, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat utama berkaitan dengan kondisi geografis wilayah pelayanan yang menyebabkan adanya perbedaan jarak antara SPPG dan sekolah penerima manfaat. Beberapa sekolah berada pada lokasi yang relatif jauh sehingga membutuhkan waktu distribusi yang lebih lama dibandingkan sekolah lain. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pengiriman makanan apabila tidak diimbangi dengan pengaturan distribusi yang efektif. Oleh karena itu, aspek distribusi masih menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan program.

Selama pelaksanaan kebijakan George C. Edwards III, kendala tersebut terkait dengan elemen struktur birokrasi dan sumber daya, khususnya dalam pengelolaan fasilitas operasional serta mekanisme pendistribusian program. Jarak distribusi yang cukup jauh menuntut adanya pengaturan rute, pemanfaatan kendaraan operasional, dan koordinasi yang lebih optimal agar makanan tetap diterima sesuai jadwal dan standar mutu. Meskipun hambatan yang ditemukan tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan, upaya penyempurnaan sistem distribusi tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan manajemen distribusi dan penyesuaian strategi operasional sesuai karakteristik wilayah pelayanan. Dengan demikian, optimalisasi sistem distribusi diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung sudah berjalan dengan baik bersumber pada 4 penanda untuk melaksanakan kebijakan George C. Edwards III, adalah komunikasi, sumber energi, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif didukung oleh sumber energi yang mencukupi, komitmen pelaksana yang besar, dan struktur birokrasi yang jelas. sanggup menunjang penerapan program cocok dengan syarat yang berlaku. Aspek pendukung implementasi meliputi koordinasi antarpelaksana, ketersediaan sumber energi manusia, fasilitas serta prasarana, dan kedudukan pakar gizi dalam melindungi kualitas santapan. Sedangkan itu, aspek penghambat utama merupakan keadaan geografis yang menimbulkan proses distribusi mengarah sebagian sekolah membutuhkan waktu lebih lama sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu pelayanan. Secara totalitas, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Kemantren Kecamatan Jabung sudah membagikan donasi positif terhadap pemenuhan gizi partisipan didik serta menunjang mutu pembelajaran yang berkepanjangan.

Saran

SPPG Kemantren Kecamatan Jabung perlu terus meningkatkan efektivitas sistem distribusi, terutama pada sekolah yang memiliki jangkauan relatif jauh, melalui penguatan perencanaan rute, koordinasi operasional, serta optimalisasi pemanfaatan sarana distribusi agar ketepatan waktu pelayanan tetap terjaga. Tidak hanya itu, riset berikutnya diharapkan bisa mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Free pada daerah yang lebih luas ataupun memakai pendekatan riset yang berbeda sehingga diperoleh uraian yang lebih komprehensif menimpa daya guna kebijakan dan akibatnya terhadap kenaikan mutu pembelajaran serta pemenuhan gizi partisipan didik.

Daftar Pustaka

Buku

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Jurnal

- Ade Maulidya, A., & Fitriani, Y. (2025). Analisis program makan bergizi gratis terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa sekolah dasar di Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*.
Habib, M., et al. (2025). Evaluasi implementasi program makan bergizi gratis di sekolah dasar Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Pendidikan*.
Li, X., Zhang, Y., & Chen, L. (2025). Free school meals and educational outcomes: Evidence from China's nutrition improvement program. *International Journal of Educational Development*, 102, 102856. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12137271/>
Nurulaini, N., & Afifah, S. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi anak sekolah dasar di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
Saputra, R. (2024). Program makan bergizi sebagai katalis peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*

Dokumen dan Publikasi Resmi Pemerintah

- Badan Gizi Nasional. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis: Strategi Nasional Pemenuhan Gizi Masyarakat*. Jakarta: BGN.
Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2025). *Laporan pelaksanaan program makan bergizi gratis Provinsi Jawa Timur tahun 2025*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id>
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). *Data pokok pendidikan nasional tahun 2024*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dokumen dan Publikasi Organisasi Internasional

- Food and Agriculture Organization. (2021). *School Food and Nutrition Framework*. Rome: FAO.
UNESCO. (2023). *Education and Nutrition: School Feeding Programs and Learning Outcomes*. Paris: UNESCO.
UNICEF. (2022). *The State of the World's Children 2022: Nutrition and Child Development*. New York: UNICEF.
United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
World Food Programme. (2023). *State of School Feeding Worldwide*. Rome: WFP.
World Health Organization. (2021). *School Feeding Programmes and Child Nutrition*. Geneva: WHO.
Kumparan. (2024, Juni 29). Program makan gratis diwaspadai gerus anggaran kementerian dan

lembaga di 2025. Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/program-makan-gratis-diwaspadai-gerus-anggaran-kementerian-and-lembaga-di-2025-23233yoSFJG>
Tempo. (2025, Februari 3). FITRA kritik penggunaan uang pribadi Prabowo untuk makan bergizi gratis. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/fitra-kritik-penggunaan-uang-pribadi-prabowo-untuk-makan-bergizi-gratis-1202117>